KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pidato Di Sidang IPU - Bamsoet Bicara Masalah Migrasi dan Pengungsi
Tanggal : Senin, 26 Maret 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pidato Di Sidang IPU

Bamsoet Bicara Masalah Migrasi Dan Pengungsi

KETUA DPR Bambang Soesatyo mengemukakan rasa prihatin atas masalah migrasi dan pengungsi yang masih menjadi persoalan serius negara-negara di dunia. Masih banyak negara belum mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut laporan Migrasi Internasional tahun 2017, setidaknya terdapat 258 juta migran di seluruh dunia. Angka tersebut meningkat sebanyak 173 juta dibanding tahun 2000.

"Sudah puluhan tahun migrasi dalam skala besar, terutama yang disebabkan konflik bersenjata dan kekerasan, menjadi tantangan yang masih dan terus dihadapi berbagai negara di dunia. Masalah tersebut harus mendapat perhatian serius dari parlemen anggota Inter-Parliamentary Union (IPU), untuk bersama mencari jalan keluar terbaik," tutur politisi yang akrab disapa Bamsoet saat pidato di sidang ke-138 IPU di Jenewa, Swiss, kemarin, seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Sidang tersebut dipimpin Presiden IPU Gabriela Cuevas Barron dan Sekjen IPU Martin Chunggong. Sidang dihadiri 69 ketua parlemen dunia serta 1.539 anggota delegasi dari 146 negara.

Bamsoet menjelaskan, DPR sangat menjunjung tinggi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Buruh Migran. Konvensi tersebut telah diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang itu bertujuan memperkuat penempatan dan perlindungan pekerja migran serta menyediakan landasan hukum yang lebih kuat bagi institusi Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

"Indonesia juga menerapkan pendekatan 'triple win' dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait migrasi. Pendekatan tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan negara pengirim, tetapi juga negara penerima dan migran," papar politisi Partai Golkar ini.

Bamsoet mengakui, Indonesia memang bukan bagian dari negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi 1951. Namun, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, Pemerintah Indonesia telah menampung sebanyak 14.000 pengungsi dan pencari suaka.

"Hal ini mencerminkan komitmen dan kepedulian Indonesia terhadap isu migrasi dan pengungsi. Sebagai negara transit, kami juga bekerja sama dengan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dan IOM (International Organization for Migration) dalam hal penyediaan fasilitas penampungan bagi pengungsi yang sedang menunggu proses pemulangan atau penempatan kembali di negara ketiga," jelasnya.

Di kancah internasional, lanjut Bamsoet, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap permasalahan pengungsi, khususnya terkait isu Rohingya di Myanmar. Kekerasan terhadap kaum Rohingya dalam segala bentuk dan manifestasinya, merupakan ancaman serius bagi keamanan dan perdamaian global. Untuk mengatasi masalah tersebut, Indonesia tampil sebagai pionir dalam melakukan langkah-langkah diplomasi yang dibutuhkan demi membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dan transparansi dalam penanganan pengungsi Rohingya. Lembaga bantuan Indonesia juga membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya. ■ USU